

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan merujuk pada rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bagi kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin, dalam sistem demokrasi pemilihan pemimpin melalui pemilihan umum (pemilu), baik pileg 2014 maupun pilpres 2014, dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sehingga pemimpin yang dihasilkan merupakan wakil suara mayoritas. Menurut mereka, cara seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kekuasaan adalah milik Allah dan pemerintahan dalam Islam harus diasaskan kepada keyakinan tersebut. Umat Islam dilarang untuk menyerahkan kekuasaannya kepada suara kaum mayoritas masyarakat karena tidak ada jaminan kaum mayoritas tidak berbuat kesalahan dan kesesatan. Pemilu bukan jalan yang tepat untuk memilih pemimpin terutama di negara Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengenai keterlibatan di dalam pemilu, kaum salafi mengambil sikap untuk tidak terlibat atau memilih untuk tidak memilih (tidak menggunakan hak pilih) lantaran memilih atau tidak memilih di dalam pemilu merupakan hak yang dapat dimanfaatkan oleh pemilih. Hal ini diambil sebagai sikap yang konsisten di dalam menolak sistem demokrasi terutama pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan akidah Islam. Meskipun kaum

salafi menolak pemilihan pemimpin melalui pemilu, namun dalam perjalanannya kaum salafi mengakui pemimpin hasil dari pemilu. Kaum salafi menekankan ketaatan kepada pemimpin merupakan prinsip yang harus dipegang oleh umat ketika menginginkan kehidupan yang baik. Ketaatan tersebut merupakan ketaatan yang bersyarat. Apabila perintah pemimpin bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka wajib untuk ditaati. Namun, jika perintah itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib taat kepadanya.

Kedua, terkait dengan mekanisme pemilihan pemimpin, kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin menyatakan memilih seorang pemimpin adalah wajib dan pemimpin tersebut harus berasal dari umat Islam itu sendiri. Kaum salafi memandang bahwa kepemimpinan merupakan amanah. Oleh karena itu, seorang pemimpin haruslah memiliki beberapa kriteria di antaranya, adil, cerdas, sehat jasmani dan rohani, berani dan tegas, taat kepada agama, dan menguasai pengelolaan pemerintahan. Selain itu kriteria lain yang sangat penting bagi seorang pemimpin yakni harus beragama Islam. Kemudian mekanisme dalam memilih pemimpin harus seperti yang dilakukan oleh para *salaf as-shalih*, yakni model penunjukan, pemilihan, dan turun menurun. Mekanisme penunjukan dilakukan oleh pemimpin terdahulu dengan menunjuk seseorang yang dianggap layak untuk menggantikannya. Mekanisme pemilihan ini tidak sama dengan mekanisme pemilihan melalui pemilihan umum (pemilu). Mekanisme pemilu yang memilih pemimpin adalah rakyat sedangkan dalam mekanisme pemilihan ini dilakukan oleh

sekelompok orang yang memiliki kriteria dan syarat tertentu yang disebut *ahl al-halli wal 'aqdi*, yang kemudian mereka memilih pemimpin. Sedangkan mekanisme turun menurun dilakukan oleh seorang pemimpin yang memberikan kekuasaannya kepada anak atau keturunannya, untuk menggantikannya. Kemudian diantara tiga metode pemilihan pemimpin di atas, yang cocok untuk diterapkan di Indonesia menurut kaum salafi majelis taklim Raudlatul Amin adalah metode pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-halli wal 'aqdi*. Untuk menjadi anggota *ahl al-halli wal 'aqdi*, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat tertentu. Sedangkan lembaga yang cocok untuk menjadi *ahl al-halli wal 'aqdi* di Indonesia adalah lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menurut kaum salafi Raudlatul Amin merupakan lembaga yang didalamnya berisi para cendekiawan dan ulama-ulama muslim.

B. Saran

Berdasarkan tema dan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang pandangan kaum salafi terhadap pemilihan umum di Indonesia dan mekanisme pemilihan pemimpin menurut kaum salafi, maka komponen utama yang berkompeten di dalamnya adalah kaum salafi itu sendiri. Oleh karena itu, melalui hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa masukan atau rekomendasi berupa pemikiran serta saran positif untuk kaum salafi guna membantu dalam mewujudkan partisipasi politik yang baik di dalam sistem kenegaraan, antara lain:

1. Kaum salafi perlu untuk melakukan komunikasi intensif dengan kekuatan pro-demokrasi untuk menjalin sinergi dalam memperjuangkan tujuan gerakannya.
2. Menghargai setiap perbedaan pendapat utamanya dalam menyikapi permasalahan keterlibatan gerakan Islam dalam proses demokrasi.

Selain itu, hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, karena keterbatasan pemahaman dan data lapangan yang dimiliki oleh peneliti sehingga kemungkinan ada hal yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis, dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan pembaca.